

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenjak penerapan kebijakan hilirisasi yang telah ditetapkan oleh ESDM di tahun 2020, dimana itu adalah kebijakan tentang pelarangan menjual atau mengekspor nikel secara mentah dan mengoptimalkan nikel di dalam negeri (Purwanto, 2024). Kementerian Investasi telah menetapkan tujuan pembangunan ekonomi nasional untuk menggunakan hilirisasi sebagai alat utama untuk memperkuat struktur industri nasional dan meningkatkan lapangan kerja di sektor strategis (Kementerian Investasi Republik Indonesia, 2023). Sektor nikel dipilih karena memainkan peran penting dalam pergerakan energi di seluruh dunia. Laporan dari *International Energy Agency* (IEA) tahun 2023 menunjukkan bahwa nikel adalah salah satu mineral paling penting dalam rantai pasok sistem penyimpanan energi dan baterai kendaraan listrik (EV). Dengan pertumbuhan industri energi bersih, permintaan nikel global diperkirakan akan meningkat lebih dari 60% pada tahun 2040. Dengan cadangan nikel yang sangat besar, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi aktor utama dalam rantai pasokan global.

Ada masalah besar di balik peluang tersebut, yaitu dominasi modal dan teknologi Tiongkok dalam pembangunan proyek smelter nikel di Indonesia. Laporan dari organisasi nirlaba keamanan global Amerika Serikat (*Center for Advanced Defense Studies*) (2025) menyatakan bahwa sekitar 75 persen kapasitas pengolahan nikel Indonesia dimiliki oleh perusahaan Tiongkok, terutama melalui kerja sama investasi di kawasan industri Morowali dan Konawe. Kondisi ini

menunjukkan bahwa, meskipun Indonesia telah menarik investasi besar dari luar negeri, penguasaan modal, teknologi, dan rantai pasokan masih didominasi oleh pihak luar, yang berpotensi menciptakan ketergantungan ekonomi baru. Jika investasi Tiongkok dalam industri nikel tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas domestik, ketergantungan ekonomi Indonesia dapat mengancam kedaulatan ekonominya dalam jangka panjang (Anandia, 2024).

Kebijakan hilirisasi diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi nasional dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Namun, kemandirian ekonomi penuh belum dapat diraih karena Indonesia masih menghadapi sejumlah masalah struktural yang menghalanginya. Di satu sisi, dominasi investasi dan transfer teknologi Tiongkok telah mempercepat industrialisasi dan menciptakan lapangan kerja baru di industri pengolahan nikel. Menurut *Data Center for Strategic and International Studies* (CSIS, 2023), proyek smelter yang didanai oleh perusahaan Tiongkok telah meningkatkan kapasitas produksi nasional dan meningkatkan ekspor nikel olahan. Selain itu, masih ada ketidaksamaan dalam bagaimana aktivitas hilirisasi membagi nilai tambahnya. Menurut analisis ekonom Faisal Basri (dalam Kontan, 2024),

Tiongkok mendapatkan sekitar 90% nilai tambah dari hilirisasi nikel Indonesia, sementara Indonesia hanya mendapatkan sekitar 10% dari keuntungan ekonomi langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa hilirisasi masih belum sepenuhnya menjadi alat untuk kemandirian; sebaliknya, ia memperkuat pola ketergantungan dengan mengubah bagaimana manfaat ekonomi didistribusikan. Sebuah laporan *Asia Times* (2024) menyatakan bahwa kehadiran modal dan

perusahaan Tiongkok menciptakan bentuk baru dari ketergantungan struktural, juga dikenal sebagai ketergantungan struktural, di mana keuntungan utama industri tertumpu pada investor asing meskipun sumber daya berasal dari Indonesia sendiri.

Dominasi Tiongkok dalam industri nikel Indonesia menunjukkan adanya keterhubungan erat antara kepentingan industrialisasi nasional dengan ekspansi kapital global. Di satu sisi, investasi Tiongkok dipandang membantu percepatan pembangunan industri nasional melalui transfer teknologi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas produksi. Namun di sisi lain, dominasi modal asing memunculkan persoalan baru terkait ketergantungan ekonomi dan penguasaan rantai produksi strategis oleh perusahaan asing. Banyak smelter dan fasilitas pengolahan nikel di Indonesia dikuasai oleh perusahaan yang sebagian besar modal dan teknologinya berasal dari Tiongkok. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hilirisasi benar-benar menciptakan kemandirian ekonomi nasional atau justru memperkuat ketergantungan baru terhadap kapital asing.

Dalam perspektif Neo-Marxisme, fenomena tersebut dapat dipahami sebagai bentuk reproduksi relasi ketergantungan dalam sistem kapitalisme global. Negara berkembang seperti Indonesia sering kali berada dalam posisi subordinat karena bergantung pada modal, teknologi, dan pasar dari negara maju atau negara industri besar. Teori dependency yang dikembangkan oleh Andre Gunder Frank dan Fernando Henrique Cardoso menjelaskan bahwa pembangunan di negara pinggiran (*periphery*) sering kali berlangsung dalam struktur ekonomi global yang timpang sehingga menghasilkan ketergantungan permanen terhadap negara pusat

(core). Dalam konteks hilirisasi nikel, meskipun Indonesia memperoleh investasi dan peningkatan ekspor, penguasaan teknologi, modal, dan jaringan pasar global tetap berada di tangan perusahaan transnasional dan kapital asing. Akibatnya, proses industrialisasi nasional berpotensi hanya menjadi bagian dari mekanisme akumulasi kapital global yang menguntungkan negara pusat.

Neo-Marxisme juga melihat investasi asing bukan semata hubungan ekonomi yang netral, melainkan instrumen hegemoni kapitalisme global. Melalui investasi, negara atau korporasi besar dapat memperluas kontrol ekonomi terhadap negara berkembang tanpa harus melakukan kolonialisme secara langsung. Dominasi perusahaan Tiongkok dalam rantai produksi nikel Indonesia memperlihatkan bagaimana kapital internasional bekerja melalui integrasi ekonomi global. Indonesia memang memperoleh manfaat ekonomi tertentu, tetapi struktur produksi dan distribusi keuntungan cenderung dikendalikan oleh aktor eksternal. Situasi tersebut mencerminkan apa yang disebut Immanuel Wallerstein dalam teori sistem dunia sebagai hubungan tidak seimbang antara pusat dan pinggiran dalam sistem kapitalisme internasional.

Problematisasi lain yang muncul dari hilirisasi nikel adalah persoalan distribusi keuntungan ekonomi yang tidak merata. Meskipun pemerintah mengklaim bahwa hilirisasi meningkatkan ekspor dan pertumbuhan ekonomi nasional, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar keuntungan strategis tetap dinikmati oleh perusahaan besar dan investor asing. Di sisi lain, masyarakat lokal di sekitar kawasan tambang dan industri sering kali menghadapi persoalan lingkungan, konflik agraria, ketimpangan sosial, dan marginalisasi

ekonomi. Penelitian Roy Setiawan dan Maudy Noor Fadlhia (2025) menunjukkan bahwa proyek hilirisasi nikel di Weda Bay menimbulkan eksklusi sosial dan kerusakan lingkungan yang berdampak langsung terhadap masyarakat lokal.

Ekspansi industri nikel juga memperlihatkan kuatnya karakter ekstraktivisme dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Negara cenderung memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan investasi dibandingkan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dalam banyak kasus, pembangunan smelter dan kawasan industri menyebabkan deforestasi, pencemaran lingkungan, serta kerusakan wilayah pesisir akibat aktivitas industri pengolahan nikel. Situasi ini menunjukkan bahwa hilirisasi belum sepenuhnya keluar dari paradigma pembangunan ekstraktif yang menempatkan sumber daya alam sebagai objek eksploitasi kapital. Dengan demikian, narasi transisi energi hijau global justru berpotensi melahirkan bentuk baru eksploitasi sumber daya di negara berkembang.

Selain persoalan ketergantungan ekonomi, industri nikel Indonesia juga memperlihatkan hubungan erat antara negara, elite politik, dan oligarki ekonomi. Dalam studi ekonomi politik Indonesia, oligarki dipahami sebagai konsentrasi kekuasaan ekonomi dan politik pada kelompok elite tertentu yang mampu memengaruhi kebijakan negara demi kepentingan akumulasi kapital. Jeffrey Winters (2011) menjelaskan bahwa oligarki bekerja melalui penguasaan sumber daya material dan akses terhadap kekuasaan politik untuk mempertahankan kepentingan ekonomi mereka. Dalam konteks industri nikel, hubungan antara pengusaha tambang, elite politik, pejabat negara, dan investor asing menunjukkan adanya konfigurasi oligarki yang kuat dalam pengelolaan sumber daya strategis.

Kebijakan hilirisasi pada akhirnya tidak hanya menjadi proyek pembangunan ekonomi nasional, tetapi juga arena perebutan kepentingan antara negara, oligarki domestik, dan kapital global. Banyak elite ekonomi nasional terlibat dalam bisnis pertambangan dan smelter nikel melalui jaringan politik dan relasi kekuasaan dengan pemerintah. Situasi ini menyebabkan kebijakan negara sering kali sulit dipisahkan dari kepentingan oligarki ekonomi. Dalam perspektif Neo-Marxisme, negara tidak sepenuhnya netral, melainkan cenderung berfungsi sebagai instrumen kelas dominan untuk menjaga stabilitas akumulasi kapital. Oleh karena itu, kebijakan hilirisasi dapat dipahami sebagai bagian dari kompromi antara kepentingan negara dalam pembangunan ekonomi dan kepentingan kapital dalam memperluas akumulasi keuntungan.

Relasi antara oligarki domestik dan modal Tiongkok juga memperlihatkan terbentuknya aliansi kapital transnasional dalam industri nikel Indonesia. Pengusaha lokal memperoleh keuntungan melalui akses konsesi tambang dan kerja sama bisnis dengan investor asing, sementara perusahaan Tiongkok mendapatkan akses terhadap cadangan nikel strategis untuk mendukung industri kendaraan listrik mereka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa globalisasi kapital tidak menghapus peran elite lokal, tetapi justru menciptakan kolaborasi antara oligarki nasional dan kapital internasional dalam proses eksploitasi sumber daya alam.

Penelitian mengenai hilirisasi nikel sebenarnya telah banyak dilakukan sebelumnya. Barizi dan Triarda (2023) meneliti hilirisasi nikel dalam konteks rantai pasok global dan nasionalisme sumber daya alam. Penelitian tersebut menunjukkan adanya konvergensi kepentingan antara pemerintah Indonesia dan bisnis global

dalam pengembangan industri nikel nasional. Sementara itu, Grasia, Tjandra, dan Setiawan (2025) menganalisis tingginya keterlibatan investasi Tiongkok dalam smelter nikel Indonesia menggunakan perspektif teori sistem dunia. Penelitian tersebut menyoroti hubungan asimetris antara Indonesia dan Tiongkok dalam industri nikel.

Penelitian lain juga membahas strategi hilirisasi Indonesia dalam pengembangan industri baterai kendaraan listrik dan diplomasi ekonomi pasca larangan ekspor bijih nikel. Anindita et al. (2025) menyoroti hubungan antara hilirisasi nikel dan diplomasi ekonomi Indonesia dalam menarik investasi asing. Adapun penelitian Setiawan (2025) mengkaji hilirisasi dari perspektif konstitusi ekonomi dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada aspek ekonomi, diplomasi, atau kebijakan industri semata, dan belum secara mendalam menghubungkan antara hilirisasi, oligarki ekonomi, dan dominasi modal Tiongkok dalam kerangka Neo-Marxisme.

Laporan Asia Times "*The True Cost of China's Hold on Indonesia's Nickel*" (2024) menunjukkan bahwa, meskipun Indonesia saat ini menjadi produsen nikel terbesar di dunia, struktur kepemilikan industri dan penguasaan teknologi menunjukkan pola hubungan ekonomi yang tidak seimbang dan tidak seimbang. Menurut laporan tersebut, lebih dari dua pertiga kapasitas pengolahan nikel di Indonesia dimiliki oleh perusahaan Tiongkok, yang berarti bahwa sebagian besar nilai tambah dan keuntungan ekonomi mengalir ke luar negeri. Dengan kata lain, meskipun kebijakan hilirisasi meningkatkan kemampuan produksi nasional,

dominasi Tiongkok dalam rantai pasokan global dapat menghambat upaya pemerintah Indonesia untuk mencapai kemandirian ekonomi. Dengan kata lain, kemandirian ekonomi yang diinginkan pemerintah Indonesia dapat terhambat oleh dominasi Tiongkok dalam rantai pasokan global, meskipun kebijakan hilirisasi meningkatkan kemampuan produksi nasional.

Selain itu, penelitian baru dari *Center for Strategic and International Studies* (CSIS, 2023) mengungkapkan peran penting negara dalam mengelola investasi asing. CSIS menyatakan bahwa keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada kemampuan institusional pemerintah untuk mengatur dan menyeimbangkan hubungan antara arus modal asing dan kepentingan nasional. mengurangi ketergantungan dan memperkuat posisinya dalam ekonomi dunia. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih banyak menekankan unsur-unsur ketergantungan dan dominasi Tiongkok. Sebaliknya, penelitian ini berkonsentrasi pada upaya Indonesia untuk mencapai independensi ekonomi melalui kebijakan hilirisasi nikel. Tujuan dari fokus ini adalah untuk mempelajari bagaimana kebijakan nasional dapat berfungsi sebagai cara untuk melawan struktur ketergantungan global dan membentuk pola pembangunan yang lebih berdaulat dan otonom secara ekonomi.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi hubungan internasional, khususnya dalam bidang ekonomi politik internasional dan kajian Neo-Marxisme. Penelitian ini juga dapat memperluas pemahaman mengenai bagaimana kapitalisme global bekerja melalui investasi asing dan integrasi rantai pasok industri strategis di negara berkembang.

Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan bahwa industrialisasi berbasis sumber daya alam tidak selalu identik dengan kemandirian ekonomi apabila struktur produksi dan penguasaan modal masih dikendalikan oleh kekuatan kapital global.

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap implementasi kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan industri nasional tidak hanya berorientasi pada peningkatan investasi dan ekspor, tetapi juga memperhatikan aspek transfer teknologi, penguatan industri domestik, pemerataan kesejahteraan, perlindungan lingkungan, serta pengurangan ketergantungan terhadap modal asing. Tanpa strategi tersebut, hilirisasi berisiko memperkuat dominasi kapital asing dan oligarki domestik dalam pengelolaan sumber daya strategis nasional.

Selain itu, secara sosial-ekonomi, penelitian ini penting untuk meningkatkan kesadaran publik dan akademisi tentang pentingnya kemandirian ekonomi dalam menghadapi perubahan geopolitik regional dan global. Dengan demikian, diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu membangun teori hubungan internasional serta membantu membangun kebijakan ekonomi nasional yang lebih berdaulat, adil, dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

“Mengapa kebijakan hilirisasi nikel Indonesia menimbulkan ketergantungan investasi terhadap Tiongkok dalam industri nikel Indonesia?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengapa kebijakan hilirisasi nikel Indonesia menimbulkan ketergantungan investasi terhadap Tiongkok dalam industri nikel Indonesia melalui hubungan ekonomi-politik antara negara, oligarki domestik, dan kapital Tiongkok dalam perspektif Neo-Marxisme David Harvey.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memperkaya pemahaman mengenai kebijakan hilirisasi nikel sebagai strategi pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Melalui pendekatan Neo-Marxisme, penelitian ini tidak hanya melihat hilirisasi sebagai kebijakan teknis ekonomi, tetapi sebagai bagian dari dinamika relasi kuasa antara negara, kapital asing, dan sistem kapitalisme global. Penelitian ini memberikan manfaat dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk ketergantungan ekonomi struktural yang masih melekat dalam industri nikel Indonesia, meskipun telah terjadi peningkatan aktivitas industri pengolahan di dalam negeri. Penelitian ini membantu menjelaskan bagaimana ketergantungan terhadap modal, teknologi, dan pasar asing dapat terus berlangsung dalam bentuk yang lebih kompleks, sehingga kemandirian ekonomi yang diharapkan berpotensi bersifat semu. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi

pada pemahaman yang lebih kritis terhadap efektivitas kebijakan industrialisasi berbasis sumber daya alam.

Penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan gambaran mengenai peran negara dalam mengelola dan menegosiasikan kepentingan nasional di tengah tekanan kapital global. Melalui analisis kebijakan dan regulasi nasional, penelitian ini menunjukkan bagaimana negara dapat berperan sebagai aktor yang aktif, tetapi tetap berada dalam batasan struktur ekonomi global yang timpang. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih berorientasi pada kedaulatan dan kemandirian ekonomi jangka panjang.

1.4.1 Manfaat akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ekonomi politik internasional, khususnya dalam penerapan perspektif Neo-Marxisme pada studi kebijakan hilirisasi sumber daya alam di negara berkembang. Penelitian ini memperluas ruang kajian Neo-Marxisme yang selama ini banyak digunakan dalam analisis relasi pusat–pinggiran, dengan mengaitkannya secara langsung pada kebijakan industrialisasi kontemporer di Indonesia. Penelitian ini juga memperkaya literatur akademik mengenai hubungan ekonomi Indonesia–Tiongkok dengan menempatkannya dalam kerangka ketergantungan dan hegemoni ekonomi, bukan semata-mata kerja sama pembangunan.

Penelitian ini memberikan alternatif sudut pandang terhadap narasi dominan yang cenderung melihat investasi asing sebagai solusi tunggal bagi pembangunan

nasional. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu kemandirian ekonomi, investasi asing, dan pengelolaan sumber daya alam strategis. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pembandingan bagi studi-studi serupa di sektor lain, seperti energi, pertambangan, dan industri manufaktur, serta mendorong pengembangan kajian kritis yang mengintegrasikan teori, kebijakan, dan struktur ekonomi global secara lebih komprehensif.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan hilirisasi nikel yang lebih berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional jangka panjang. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap sejauh mana kebijakan hilirisasi yang ada mampu mengurangi ketergantungan terhadap modal, teknologi, dan pasar asing, khususnya dari Tiongkok. Penelitian ini juga dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan regulasi investasi asing agar lebih berpihak pada kepentingan nasional dan pembangunan industri domestik.

1.5 Sistematika Penulisan

Proposal Tugas Akhir ini terbagi menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain dalam membahas permasalahan mengenai upaya Indonesia membangun independency ekonomi di tengah hegemoni Tiongkok pada industri nikel. Adapun sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penjelasan umum mengenai latar belakang masalah yang melandasi dilakukannya penelitian ini, perumusan masalah atau pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara akademis maupun praktis, serta kerangka teoritik yang digunakan sebagai landasan analisis. Bab ini juga mencakup sistematika penulisan yang menjelaskan struktur Tugas Akhir.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian mengenai tinjauan pustaka yang relevan dengan topik penelitian, baik dari teori, jurnal ilmiah, maupun laporan penelitian terdahulu yang membahas hubungan ekonomi Indonesia–Tiongkok dan kebijakan hilirisasi nikel. Pada bagian ini juga dijelaskan teori utama yang digunakan, yaitu Neo-Marxisme kacamata David Harvey. Selain itu, bab ini juga menjelaskan metode penelitian yang digunakan, seperti pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB III HILIRISASI NIKEL DAN STRUKTUR INDUSTRI DI INDONESIA

Bab ini berjudul “Hilirisasi Nikel dan Struktur Industri di Indonesia, berisi pembahasan mengenai kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia, struktur dan pola kepemilikan industri nikel, peran negara dalam pengelolaan industri nikel, serta

masuknya investasi tiongkok dalam industri nikel Indonesia. Bab ini menguraikan bagaimana dominasi modal, teknologi, dan pasar dari Tiongkok berperan dalam membentuk dinamika kerja sama ekonomi antara kedua negara.

BAB IV OLIGARKI EKONOMI DAN DOMINASI MODAL ASING DALAM INDUSTRI NIKEL

Bab ini berjudul “Oligarki Ekonomi dan Dominasi Modal Asing dalam Industri Nikel”, berisi analisis terhadap oligarki ekonomi dalam industri nikel Indonesia, relasi antara negara, oligarki, dan modal asing, negara dan oligarki dalam kebijakan hilirisasi nikel, relasi oligarki domestik dan modal asing Tiongkok, dominasi investasi Tiongkok dalam rantai nilai nikel, kegagalan struktural hilirisasi dalam mewujudkan kemandirian industri nasional, ketergantungan baru terhadap kapital dan investasi Tiongkok, implikasi terhadap kemandirian ekonomi nasional, strategi penguatan regulasi dan optimalisasi kebijakan hilirisasi dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Bab ini juga akan menelaah implikasi dari relasi tersebut terhadap kemandirian ekonomi nasional, serta sejauh mana kebijakan hilirisasi nikel dapat menjadi bentuk resistensi terhadap struktur ketergantungan global dan kontribusinya terhadap kemandirian ekonomi nasional.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan serta saran atau rekomendasi penelitian yang ditujukan bagi pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan terkait. Bab ini juga mencakup arah lanjutan penelitian yang dapat dikembangkan pada tahap berikutnya untuk memperdalam studi mengenai independensi ekonomi Indonesia dalam konteks hubungan internasional.

